

Referendum Skotlandia terhadap Britania Raya Tahun 2014

Sandi Saputra.¹ Alumni Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, IISIP Jakarta

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui upaya-upaya *Scottish National Party* (SNP) dalam memperjuangkan referendum Skotlandia terhadap Britania Raya tahun 2014. Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif. Hasil Penelitian: Hubungan Skotlandia dengan Britania Raya sebagai persekutuan dimulai pada tahun 1707 melalui *Act of Union 1707*. Britania Raya terdiri dari empat bangsa yaitu Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia dan Wales. SNP berdiri pada tahun 1934 sebagai partai dengan aliran nasionalis dan meraih kekuasaan di eksekutif dari tahun 2007 sejak pemerintahan Skotlandia kembali berdiri pada tahun 1998. Penelitian ini dikaji dari sudut pandang konstruktivisme dengan norma internasional *self-determination*. SNP bertindak dipengaruhi oleh norma *self-determination* yang membentuk identitas SNP yaitu nasionalisme. Kemudian identitas itu membentuk kepentingan SNP untuk memisahkan Skotlandia dari Britania Raya. Untuk mencapai kepentingan tersebut SNP melakukan empat upaya yaitu mengajukan proposal perubahan *Scotland Act 1998* ke pemerintah Britania Raya, mengajukan proposal penyelenggaraan referendum ke parlemen Skotlandia, *framing issues* kemerdekaan Skotlandia dan kampanye pemisahan skotlandia dari Britania Raya. Namun, SNP gagal mencapai kepentingannya dengan hasil hanya 44.7% yang mendukung SNP dalam referendum pada tanggal 14 September 2014. Dengan demikian referendum ini bukanlah realitas sosial yang *given* namun hasil dari konstruksi SNP.

The aim of this research is to know the efforts of Scottish National Party (SNP) in struggling for a Scottish referendum against United Kingdom in 2014. Research Method: Qualitative Descriptive. Research result: Scotland's relationship with the United Kingdom as the Alliance began in 1707 through the Act of Union 1707. The United Kingdom consists of four nations, England, Northern Ireland, Scotland and Wales. The SNP was established in 1934 as the party with the nationalist streams and grabbed power in the Executive of the Scottish Government since 2007 which re-established in 1998. This research examined from the perspective of Constructivism with the international norm self-determination. SNP Act affected by a norm of self-determination that form the identity of the SNP which is nationalism. Then it forms the identity of interests the SNP to separate Scotland from the United Kingdom. To achieve the interests, SNP had four attempts, proposed changes in Scotland Act 1998 to the Government of the United Kingdom, proposed a referendum to the Scottish Parliament, in framing issues of Scottish independence and campaign to separate Scottish from the United Kingdom. However, the SNP failed to reach their interests with the results only 44.7% who support the SNP in a referendum on September 14, 2014. Thus, this referendum is not a given social reality but the result of the construction of the SNP.

Key words: *United Kingdom, Scotland, SNP, Constructivism, Self-determination, Self-government, Referendum*

¹ Alamat: Kampus IISIP Jakarta Jl.Raya Lenteng Agung No.32 Jakarta Selatan 12610. Tel. 021-7806223, 7806224. Fax.021-7817630

Pendahuluan

Pemerintahan merupakan wadah bagi politisi untuk bertindak secara sah berdasarkan konstitusi untuk keberlangsungan negara dan bangsa yang disebut dengan kedaulatan (Locke, 1823). Sistem pemerintahan dalam perjalannya terdapat empat kelompok besar, paling awal adalah monarki, kemudian pemerintahan diktator fasisme pada era perang dunia kedua disusul oleh komunisme yang sangat populer pada masa perang dingin dan kemudian yang terakhir adalah demokrasi sebagai evolusi terakhir sistem pemerintahan manusia (Fukuyama, 1992).

Di dalam demokrasi hak yang paling utama adalah mengenai hak asasi manusia, sebagai ciri utama dalam negara demokrasi sehingga menjadi nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua masyarakat dunia (Lewis & Skutsch, 2001; Bauman, 2000; Sen, 1999). Peran dari masyarakat dalam negara demokratis dewasa ini salah satunya adalah mengenai referendum dalam menentukan suatu kebijakan atau sikap pemerintah yang krusial (Schwartzberg, 2007; Schumpeter, 2003). Menurut Şen (2015) referendum adalah :

“Referendums is their legitimating power: allowing the people to express their consent in the process of determination of a political unit. Referendums are popular consultations pertaining to territorial modifications, the independence of states, the self-determination of a community or adhesion of a state to a supranational organisation...”.

Berdasarkan penjelasan Şen di atas referendum adalah kekuatan yang sah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan keputusan politik. Penyelenggaraan referendum meliputi penentuan mengenai teritorial, kemerdekaan atau pemisahan negara, penentuan (*self-determination*) keikutsertaan dalam organisasi internasional (Şen, 2015).

Referendum dalam implementasinya digunakan oleh Skotlandia terhadap Britania Raya pada tahun 2014 dengan hasil 44.7% mendukung pemisahan Skotlandia dari Britania Raya sehingga pemisahan ini gagal (McKirdy, Smith-Spark, & Robertson, 2014). Integrasi Skotlandia dengan Inggris yang membentuk

Britania Raya melalui *Act of Union 1707* yang saat ini terdiri dari Inggris, Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia dengan nama resmi *The United Kingdom of Great Britain and North Ireland* (Wormald, 2005). Referendum ini terjadi pada masa pemerintahan *Scottish National Party* (SNP) yang berdiri sejak tahun 1934 dengan ideologi nasionalisme (Aberdeen SNP, 2016).

SNP dalam perkembangannya berafiliasi dengan *European Free Alliance* (EFA) dengan ideologi nasionalisme-regionalisme. SNP mengadopsi norma yang ada di dalam EFA secara resmi yaitu *self-determination* pada tahun 1989 (EFA, 2006). Norma *self-determination* adalah hak untuk menentukan nasib sendiri, yang pertama kali muncul di dalam struktur internasional melalui ide Woodrow Wilson, kemudian secara resmi terdapat di dalam piagam PBB (United Nations, 1945).

SNP menguasai eksekutif sejak tahun 2007, kemudian tahun 2011 kembali berkuasa dengan mendapatkan suara mayoritas di parlemen (Herbert, et al., 2007, 2011). Sehingga ada peran besar SNP dalam referendum Skotlandia terhadap Britania Raya pada tahun 2014.

Tinjauan Teoritik

Penelitian ini fokus terhadap upaya SNP dalam memperjuangkan referendum Skotlandia terhadap Britania Raya tahun 2014. SNP sebagai kelompok yang memiliki ideologi nasionalisme melakukan interaksi dengan struktur internasional dan regional yang mempengaruhi pandangannya terhadap struktur sub-regional hubungan antara Skotlandia dengan persekutuan Britania Raya. Pengaruh tersebut yaitu diterimanya norma *self-determination* menjadi pemahaman bersama SNP (*shared meaning*) sehingga membentuk identitas SNP yang kemudian menentukan kepentingannya yang berujung dengan referendum Skotlandia terhadap Britania Raya pada tahun 2014. Hal ini dilihat sebagai realitas sosial yang tidaklah *given* namun sebagai hasil dari konstruksi SNP. Terori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konstruktivisme dengan konsep *Norm life cycle* dan identitas serta kepentingan.

Pandangan yang kontras konstruktivisme

menurut Wendt (2001) bahwa neorealisme melihat struktur internasional sebagai distribusi kekuatan materi, karena neorealis melihat dari sudut pandang material *gain*. Neoliberalisme melihat bahwa struktur internasional adalah sebagai kekuatan yang di dukung oleh institusi, karena perspektif neoliberalisme berdasarkan material dan superstruktur, sedangkan konstruktivisme melihat bahwa struktur sistem internasional adalah distribusi dari ide-ide yang ada di dalam struktur tersebut.

Di dalam konstruktivisme tingkah laku agen atau aktor sangat dipengaruhi oleh norma internasional, sehingga mendorong agen tersebut untuk bertindak, karena kesadaran agen tersebut terhadap kondisi mereka di dalam struktur masyarakat (Sikkink, 1998). Prinsip fundamental dari konstruktivisme yang pertama tentang tindakan masyarakat didasarkan pada pemahaman. Kedua, pemahaman muncul berdasarkan konstruksi oleh agen, dalam penelitian ini direpresentasikan oleh SNP yang merupakan kelompok individu. Struktur di dalam pandangan konstruktivisme untuk menggambarkan mengenai hubungan sosial dan *shared meaning* (Burchill, et al., 2005). Selanjutnya pemahaman tersebut memunculkan kebutuhan dan keinginan yang membentuk sebuah nilai sosial yaitu identitas dan kepentingan yang disampaikan melalui perilakunya dengan cara mengampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat (Nugroho, 2008).

Struktur sosial ditentukan oleh *subjektifitas meaning*, struktur dan agen saling menentukan satu sama lain, interaksi struktur dengan agen menghasilkan identitas dan kepentingan. Hal ini juga menentukan posisi agen di dalam struktur sosial sebagai kelompok yang memiliki nilai atau norma (Paul, 2012). Sehingga agen

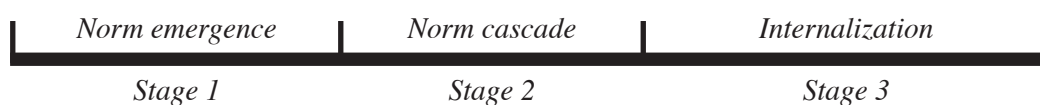
perannya penting bukan hanya sebagai pelaksana melainkan menentukan terbentuknya sebuah struktur (Steans et al, 2010). Dengan demikian struktur dan agen saling mempengaruhi, hal ini terjadi dalam referendum Skotlandia bahwa struktur tersebut mempengaruhi SNP dalam membentuk identitas dan menjalankan tujuannya di dalam struktur hubungan Skotlandia dengan persekutuan Britania Raya yang termanifestasi di dalam manifesto partai. Berbeda halnya dengan agen di dalam strukturalis, yang bertindak sebagai pelaksana, struktur sendiri telah terbangun (Dunne, Kurki, & Smith., 2013).

1. Norm Life Cycle

Untuk membuat norma internasional diterima di level domestik menurut Finnemore dan Sikkink, norma tersebut akan melalui tiga tahap, terdapat aktor yang terlibat serta motivasi yang diyakini dan dimiliki oleh agen tersebut. Proses ini disebut dengan "*Life cycle norm*" (lihat Bagan 1).

Stage 1: Origins or emergence of norms. Generalisasi dari berbagai hal tersebut menjadi ada dua macam elemen dari tahap satu yaitu *norm entrepreneurs* dan *organizational platforms* ide tersebut didistribusikan dengan persuasi. **Stage 2:** Proses adopsi yang berupa akses oleh agen adalah bentuk legitimasi dan norma tersebut dituangkan kedalam norma agen. Aktor yang dominan dalam tahap ini adalah organisasi internasional **Stage 3:** Ketika norma sudah di terima oleh agen, langkah selanjutnya adalah menginternalisasikan norma tersebut kepada anggota agen sehingga norma tersebut dapat diterima dan menjadi standar perilaku agen dalam bertindak. Peran dari teori ini adalah menjelaskan proses masuknya norma *self-determination* ke dalam SNP. Kemudian norma tersebut membentuk identitas SNP.

Bagan 1. Proses *life cycle norms*



Sumber: Finnemore & Sikkink 1998

2. Identitas dan Kepentingan

Fokus utama dari konstruktivisme adalah ide-ide, norma, pengetahuan, budaya, argumen politik, penekanan pada intersubjektifitas ide atau pemahaman kehidupan sosial (Finnemore & Sikkink, 2001). Identitas adalah pandangan seseorang kepada dirinya terhadap lingkungannya di dalam suatu struktur (Griffiths, 2007b; Griffiths, Roach, & Solomon, 2009). Struktur dalam pandangan konstruktivisme berupa norma, peraturan-peraturan, prinsip kepercayaan, pengetahuan, kebiasaan dan lembaga (Williams, 2008).

Identitas adalah pandangan kepada diri sendiri terhadap orang lain yang memberikan pemahaman bahwa diri sendiri berbeda dengan yang lain sehingga membentuk kepribadian yang khas. Identitas dapat berubah sepanjang waktu, tergantung pada aktor (agen) dan faktor yang mempengaruhinya yaitu struktur itu sendiri. Interaksi antara agen dengan struktur akan mempengaruhi satu sama lain sehingga akan memberikan identitas yang dapat berubah-ubah (Viotti & Kauppi, 2012). Kesadaran manusia sangat penting bahwa identitas dirinya dapat diberikan dan dipengaruhi dari pihak lain (Weber, 2005).

Dengan adanya interaksi antara agen (SNP) dan struktur tersebut maka mempengaruhi pandangan SNP terhadap struktur persekutuan Skotlandia dengan Britania Raya. Kemudian norma (*Self-determination*) tersebut membentuk suatu identitas yang mendorong terbentuknya keinginan atau kepentingan bagi SNP. Kemudian untuk mencapai kepentingan tersebut SNP melakukan berbagai upaya untuk menanamkan ide dan gagasannya kepada masyarakat Skotlandia sehingga tercipta intersubjektifitas di antara masyarakat Skotlandia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui data sekunder. Penulis melakukan pengumpulan data berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen internal yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data sekunder

kemudian dilengkapi dengan data berupa wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Narasumber yang dipilih adalah 1. Simon Elder (*Chief of Constitution and UK Relations*), perwakilan pemerintah Skotlandia, 2. Adam Erington, bagian informasi dan humas *Scottish National Party* (SNP) *Scottish National Party*.

Pembahasan

Scottish National Party (SNP)

SNP adalah kelompok individu yang mendirikan partai politik dan berusaha mengimplementasikan nilai dan keyakinan mereka di dalam masyarakat Skotlandia. Nilai yang dibawa SNP ini berasal dari organisasi sebelumnya yaitu *The Scots National League* (1921) dan *Glasgow University Scottish Nationalist Association* (1927), kedua organisasi tersebut berbasis di Glasgow yang membentuk *National Party of Scotland* (NPS) tahun 1928. Kemudian tahun 1934 NPS menggabungkan diri dengan *Scotland Party* membentuk SNP dengan pemimpin pertama Sir Alexander MacEwen (Aberdeen SNP, 2016).

Idologi SNP adalah nasionalisme, yang berlandaskan pada cara pandang terhadap identitas bangsa dengan kecintaan yang mendalam terhadap bangsanya sendiri (Calhoun, 1993). Kelompok ini pada tahun 2013 memiliki anggota 25.000 yang meningkat sebesar 111,6% dibandingkan dengan tahun 2011 dan terbesar di dalam sejarah SNP (Newsnet Scot, 2013). Hal ini tidak terlepas dari peran Alex Salmond yang menjabat sebagai pemimpin SNP melalui konferensi nasional tahun 1990 dan *National Conventer* sejak tahun 1997 yang juga sebagai pemimpin SNP (SNP, 1997).

Pada tahun 2007, untuk pertama kalinya SNP memiliki 46 kursi di parlemen Edinburgh, sehingga menempatkan partai ini menjadi kelompok penguasa di legislatif untuk pertama kali. Namun tidak menjadi mayoritas di parlemen karena pihak Konservatif dan Demokrat Liberal menjalin koalisi sebagai oposisi (Herbert, et al., 2007). Kemudian tahun 2011 SNP mendapatkan 69 kursi dari 129 yang tersedia, sehingga menguasai parlemen dan pemerintahan (The

Electoral Commission, 2011). Selain itu SNP juga memiliki sayap *Young Scots for Independence* (YSI) atau juga dikenal dengan *SNP Youth* dan *SNP Students* (SNP Youth, 2016).

SNP melihat bahwa hubungan antara Skotlandia dengan Britania Raya dalam konteks ekonomi dan politik tidak dalam posisi yang baik, karena tidak mengakomodir kepentingan rakyat Skotlandia, meliputi masalah kebijakan seperti fiskal dan perdagangan luar negeri, yang banyak diintervensi oleh *Westminster* (DPI, 2014). Kemudian, nilai dan pandangan SNP tersebut semakin kuat karena dipengaruhi oleh norma *self-determination* sehingga membentuk identitas SNP.

Norma *Self-determination*, Identitas dan Kepentingan SNP

Norma *self-determination* pertama kali lahir (*norm emergence*) dari ide presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson (*norm entrepreneur*) pada perjanjian perdamaian Versailles dengan motivasi untuk memberikan penghargaan dan perlindungan kepada setiap bangsa yang memiliki hak yang sama untuk menentukan nasib sendiri (Cop & Eymirliogtu, 2005). Kemudian secara legal formal terdapat dalam Piagam PBB (*organizational platform*) pasal 1 ayat 2 dan pasal 55. "*To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples.*" (United Nations, 1945).

Selain itu dipertegas dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 tahun 1960 yang dikenal dengan *United Nations Law of Decolonization* dengan mengadopsi *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *the International Covenant of Economic, Social and Civil Rights* (ICESCR) pada pasal 1 disebutkan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

Norma *self-determination* di regional Eropa terdapat dalam organisasi EFA melalui *Charter of Cooperation for the Construction of a Europe of the Nations* tahun 1979 dengan konsep "*People of Europe*". Piagam ini menekankan bahwa setiap bangsa khususnya minoritas,

berhak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri (Coppieters, 1979a). kemudian diperkuat *Sovereignty, Social Justice, Subsidiarity: Towards a Europe of Diversity* tahun 2004 (EFA, 2004). SNP mengadopsi piagam ini tahun 1989.

Setelah diadopsi langkah selanjutnya internalisasi. John MacCormick (pendiri *Scotland Party*) secara tegas mendukung *self-government* dan Alexander MacEwen (NPS) mendukung *devolution* berperan penting menginternalisasikan norma *self-determination* ke dalam SNP (Mitchell & Hssan, 2016). MacCormick menanamkan ide *self-determination* melalui "*Scotland Reconstruction*". Kemudian MacEwen keluar tahun 1942 dan membentuk *Scottish Covenant Association* dengan konsep "*Home rule*". Namun tahun 1952, SNP justru mengadopsi ide *Home rule* menjadi arah kebijakan SNP yang dilihat sama dengan prinsip *self-determination* (Aberdeen SNP, 2016). Selain dua aktor tersebut, Winnie Ewing yang dijuluki *Madame Ecosse* (bahasa Prancis) dari parlemen Eropa yang artinya ibu bangsa Skotlandia yang menanamkan ide pemerintahan sendiri bangsa Skotlandia. Tokoh ini menggagas referendum pertama dan kedua, yang terkenal dengan kata sambutannya pada pembukaan parlemen Skotlandia tahun 1998 "*The Scottish Parliament, adjourned on the 25th day of March 1707, is hereby reconvened*" (EFA, 2000).

Identitas dan kepentingan SNP di pengaruhi oleh norma *self-determination* yang sudah diadopsi dan diinternlisasikan. Pertama identitas SNP tercermin di dalam slogan/ frasa yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan tujuan dari sebuah organisasi atau individu (Merriam Webster, 2017). Slogan SNP yaitu *Scotland's Future: Independence in Europe*, yang berarti bahwa bangsa Skotlandia merupakan bagian dari bangsa Eropa yang sama seperti bangsa Jerman, Islandia, Latvia, Austria, Sardinia (Italia) dan Denmark, yang memiliki hak yang sama sebagai bangsa yang berdaulat (Macartney, 1990). Slogan ini muncul dari *Claim of Right for Scotland* 1988 (adopsi 1689) dan *Annual National Conference*.

Kedua *A Constitution for a Free Scotland*,

yaitu ide SNP yang memandang seharusnya Skotlandia memiliki konstitusi yang tertulis dan terpisah dari Britania Raya ditulis tahun 1962, diadopsi tahun 1977 dan dihidupkan kembali tahun 2002 (SNP, 2002; Aberdeen SNP, 2016). Ketiga adalah *Scotland White Paper* yaitu dokumen resmi pemerintahan SNP tahun 2007 dan 2009, dengan judul *Choosing Scotland's Future: A National Conversation* dan *Choosing Scotland's Future: A National Conversation* (Scottish Executive RR Donnelley, 2007). Dokumen tersebut berisi ide-ide dan gagasan SNP mengenai masa depan pemerintahan bangsa Skotlandia yaitu ide mengenai referendum. (Scottish Executive RR Donnelley, 2007; The Scottish Government, 2009b).

Keempat adalah manifesto, SNP meyakini bahwa dirinya dapat membangun kembali bangsa Skotlandia "*This manifesto has laid out the main proposals of the SNP for the creation of an independent nation once again* (SNP, 1997). Terakhir (kelima) adalah Draft Referendum Bill Consultation yaitu proposal pemerintahan SNP untuk melaksanakan referendum dengan keyakinan kedaulatan rakyat Skotlandia (*The Scottish Government*, 2010). Kemudian, konstruksi identitas tersebut membentuk identitas SNP sebagai kelompok nasionalis. Identitas tersebut kemudian membentuk suatu kepentingan yaitu keinginan SNP untuk memisahkan Skotlandia dari persekutuan Britania Raya.

Upaya SNP untuk Memisahkan Skotlandia dari Britania Raya

Upaya yang dilakukan SNP untuk mencapai kepentingannya melalui empat cara yaitu mengajukan proposal perubahan *Scotland Act 1998* ke pemerintah Britania Raya, mengajukan proposal penyelenggaraan referendum ke parlemen Skotlandia, *framing issues* kemerdekaan Skotlandia dan kampanye pemisahan skotlandia dari Britania Raya.

Pertama, *Scotland Act 1998* yang mengatur kekuatan pemerintahan dan parlemen Edinburgh, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengubah konstitusi dan menyelenggarakan referendum. Sehingga SNP mengajukan perubahan ke

pemerintah Britania Raya dibalas dengan sebuah dokumen *Scotland's constitutional future A consultation on facilitating a legal, fair and decisive referendum on whether Scotland should leave the United Kingdom* yang menyimpulkan parlemen Edinburgh tidak dapat melaksanakan referendum. Kemudian dibentuk tim dan dikeluarkan dokumen *Scotland's Constitutional Future Responses to the Consultation* yang melibatkan partisipasi masyarakat Skotlandia dengan kesimpulan rakyat menginginkan masalah referendum dijalankan kembali (*The Secretary of State for Scotland & Command of Her Majesty*, 2012). Kemudian pada tahun 2012, disepakati melalui *Edinburgh Agreement* bahwa parlemen Skotlandia dapat menyelenggarakan referendum secara mandiri (*The Secretary of State for Scotland & Command of Her Majesty*, 2012).

Kedua, proses pengajuan proposal penyelenggaraan referendum ke parlemen melalui empat tahap. Pertama adalah *Introduction Bill* yaitu untuk pertama kalinya naskah prososal referendum dikenalkan atau diajukan ke parlemen oleh Nicola Sturgeon sebagai perwakilan dari pemerintah pada tanggal 11 Maret 2013. Kedua adalah *Debate Bill* yaitu dimulainya perdebatan dengan mengajukan *motion* pada tanggal 14 Mei 2013. Alex Salmond dan Nicola Sturgeon yang mendominasi *motion* dengan topik mengenai rencana dana yang akan digunakan pada referendum. Ketiga adalah *Bill Committee Considered* yaitu komite yang sudah dibentuk sebelumnya pada tahap pertama mempertimbangkan untuk meloloskan proposal ini menjadi undang-undang atau menolaknya. Tahap yang terakhir adalah melegalisasi proposal *Referendum Bill* (SPICe Information, 2013b; 2013c).

Setelah melalui empat proses dengan hasil penambahan pemilih usia 16 dan 17 dan penyerahan otoritas penyelenggaraan ke pada Komisi Pemilihan Umum maka pada tanggal 27 Juni 2013 proposal *Scottish Independence Referendum Bill* disahkan menjadi *Scotland Referendum Act 2013* dengan pertanyaan tunggal "*Should Scotland be an independent country?*" (SPICe Information, 2013a).

Ketiga adalah *framing issues*. *Framing* adalah menginternalisasikan konsep, ide, nilai atau gagasan ke pada publik melalui penggunaan bahasa untuk mempengaruhi kognisi (pengetahuan) publik sehingga (dengan tujuan) tercipta persepsi dan pemahaman yang sama (*intersubjective meaning*) di dalam masyarakat (*Frame Work Intitute*, 2002).

Framing yang pertama adalah *speech act*, penggunaan bahasa kuat (penekanan makna) di dalam sebuah pidato, demonstrasi atau suatu kondisi seseorang mengeluarkan kalimat retorik di dalam khalayak ramai (Smith, 1991). Pada pertemuan tahunan 2011, 2014 dan 2015 secara berulang-ulang Alex Salmond menekankan konsep hak menentukan nasib sendiri “*Scotland needs Independence, self determination and self respect. And right now, Scotland needs the SNP*” (UKPOL, 2015a, 2015b, 2015c). Kemudian didukung oleh Strugeon pada tahun 2012 Skotlandia “*as a government, we are determined to do everything we can now to mitigate the worst impacts of these cut*” (UKPOL, 2015e). Terakhir John Swinney, Menteri Keuangan Skotlandia pada pertemuan tahunan Musim Semi SNP di depan ribuan simpatisan SNP dan masyarakat umum, berupaya membangun persepsi masyarakat untuk meyakinkan bahwa Skotlandia adalah negeri yang sangat potensial untuk menjadi negara yang mandiri (UKPOL, 2015d).

Framing yang kedua melalui media masa *Herlald Skotland* (*Sunday Herald*), *The National* dan *Evening Times*, secara terang-terangan mendukung ide SNP dengan penerbitan artikel *Self-determination* 10.1% dari total artikel terbit. (Scotland Herald, 2014). Selain itu ada 10 media lainnya yang juga melakukan *framing* secara besar-besaran (Dekavalla, 2016). Kemudian, BBC Skotlandia dan STV juga melakukan *framing issues* kemerdekaan Skotlandia melalui debat Nicola dan Alex Salmon terhadap kelompok yang menolak (BBC, 2014c, 2014d, Dekavalla, 2015; STV, 2013a, 2013b, 2014; Beaton, 2013).

Keempat adalah kampanye terbuka. *Kampanye* merupakan usaha terakhir dari SNP untuk membangun persepsi masyarakat Skotlandia bahwa pemisahan Skotlandia dari

Britania Raya adalah jalan terbaik untuk masa depan bangsa Skotlandia. Kampanye SNP fokus terhadap “*Yes Scotland*” yang merujuk pada pertanyaan referendum dengan didukung oleh 21 organisasi kampanye (The Electoral Commission, 2014). Mekanisme kampanye dilakukan melalui berbagai cara yaitu video yang paling terkenal adalah *Our Choice Between Two Future* tentang pilihan negara di masa yang akan datang (Yes Scotland, 2013). Kemudian, poster, pamflet yang di bawa oleh para pendukung salah satunya bertuliskan “*Scottish not British*” dan “*End London Rule*”. Selain itu SNP juga menggunakan situs <http://www.yesscotland.net>. dan www.scotreferendum.com serta Twitter dan Facebook untuk menggalang dukungan (Connectivity, 2014; Business Insider Indonesia, 2014).

Analisis Upaya SNP untuk Memisahkan Skotlandia dari Britania Raya pada Referendum 2014

Walaupun hasil dari referendum ini menunjukkan bahwa hanya 44.7% yang mendukung pemisahan Skotlandia dari Britania Raya namun hasil ini sudah cukup baik bagi SNP. Namun SNP sudah berhasil membawa perubahan, pertama untuk pertama kalinya penyelenggaraan referendum dilaksanakan oleh pemerintah dan parlemen Skotlandia secara otonomi, yaitu tidak ada intervensi dari pihak Britania Raya (*The Scottish Government*, 2013d).

Kedua, untuk pertama kalinya pemilih usia 16 dan 17 tahun dapat memilih, hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa 75% dengan 95% dari pemilih tersebut ingin kembali memilih jika terjadi lagi referendum. Selanjutnya, untuk pemilih usia 16-34 tahun partisipasi mencapai 69% dan untuk usia 55 tahun ke atas dengan partisipasi paling tinggi yaitu 92% dengan total keseluruhan partisipasi 84,6% (*The Electoral Commission*, 2014). Ketiga, tingkat kepuasan masyarakat dengan proses referendum sangat tinggi yang mencapai 60% dan sedangkan yang merasa tidak puas dengan prosesnya hanya 1%, tingkat kepuasan ini bukan pada hasil tapi prosesnya (*The Electoral Commission*, 2014).

Terakhir, angka capaian 49% untuk

masyarakat yang melakukan voting adalah untuk mengekspresikan diri mereka dan hanya 14% yang menyatakan untuk menjaga status quo, sehingga referendum ini adalah bentuk ekspresi masyarakat yang telah terpengaruh oleh SNP. Hal ini menunjukkan suara mereka dalam proses pemilihan dan sedikit sekali yang mempunyai alasan untuk menjaga status *quo* antara Skotlandia dengan Britania Raya. Dengan demikian SNP cukup berhasil dalam mempengaruhi struktur sosial di Skotlandia.

Kesimpulan

Referendum Skotlandia terhadap Britania Raya merupakan hasil dari konstruksi identitas yang membentuk kepentingan SNP dalam usaha untuk memisahkan Skotlandia dari Britania Raya melalui mekanisme referendum. Namun, SNP gagal mencapai kepentingannya dengan hasil hanya 44.7% yang mendukung SNP dalam referendum pada tanggal 14 September 2014. Dengan demikian referendum ini bukanlah realitas sosial yang *given* namun hasil dari konstruksi yang dilakukan oleh SNP melalui upaya mengajukan proposal perubahan *Scotland Act 1998* ke pemerintah Britania Raya, mengajukan proposal penyelenggaraan referendum ke parlemen Skotlandia, *framing issues* kemerdekaan Skotlandia dan kampanye. Perilaku ini dipengaruhi oleh identitas SNP sebagai kelompok nasionalis yang tercermin dalam slogan, *A Constitution for a Free Scotland*, *Scotland White Paper*, manifesto dan *Draft Referendum Bill Consultation* yang dipengaruhi oleh norma *self-determination*. Namun, terlepas dari hasil tersebut SNP cukup berhasil mengubah struktur sosial dan hubungan Skotlandia dengan Britania Raya.

Daftar Pustaka

- Aberdeen SNP. (2016, Januari 9). History of SNP. Retrieved from Aberdeen SNP: Independence for Scotland: <http://aberdeensnp.org/node/9>
- Bakry, U. S. (2016). *Pedoman Penulisan Sekripsi Hubungan Internasional*. Jakarta: Deepublish.
- Bauman, R. A. (2000). *Human Rights in Ancient Rome*. New York: Routledge.
- British History. (1747). The first Parliament of Queen Anne (continued): Further material relating to the Act of Union. *The History and Proceedings of the House of Commons: volume 4: 1706-1713 (1742)*, 1-45.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Paterson, M., Christian Reus-Smit, & True, J. (2005). *Theories of International Relations: Third edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2013). *International Relations Theories*. New York: Oxford Press.
- EFA. (2006). The first 25 years of history (1981-2006). *Brussels: European Free Alliance*.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (2001). Taking Stock: The Constructivist Research Program in International Relations and Comparative Politics. *Annual Review of Political Sciences* (pp. 391-416). Washington DC: Annual reviews.
- Frame Work Institute. (2002). *Framing Public Issues*. Washington DC: Frame Work Institute.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of History and The Last Man*. New York: The Free Press.
- Griffiths, M. (2007b). *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction*. New York: Routledge.
- Griffiths, M., Roach, S. C., & Solomon, M. S. (2009). *Fifty Key Thinkers in International Relations*.
- Herbert, S., Burnside, R., Earle, M., Edwards, T., Foley, T., & McIver, I. (2007). *SPICe Briefing Election 2007*. Edinburgh: The Scottish Parliament.
- Herbert, S., Burnside, R., Earle, M., Liddell, G., & McIver, I. (2011). *SPICe Briefing Election 2011*. Edinburgh: The Scottish Parliament.
- Lewis, J. R., & Skutsch, C. (2001). *Encyclopedia of Human Rights*. New York: M.E Sharpe, INC.
- Locke, J. (1823). *Two Treaties of Government Volume V*. London: The Works of John Locke.
- Macartney, A. (1990). *Scottish Government Yearbook 1990*. Edinburgh: Scottish Government.

- Merriam Webster. (2017, Januari 9). *slogan*. Retrieved from Merriam Webster: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/slogan>
- Nugroho, G. (2008). Constructivism and International Relations Theories. *Global & Strategis*, 85-98.
- Paul, T. (2012). *International Relations Theory and Regional Transformation*. Edinburgh: Cambridge University.
- Schumpeter, J. A. (2003). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Routledge.
- Schwartzberg, M. (2007). *Democracy and Legal Change*. Edinburgh: Cambridge University.
- Scottish Executive RR Donnelley . (2007). *Choosing Scotland's Future: A National Conversation*. Edinburgh: Scottish Executive.
- Sen, A. (1999). Democracy as Universal Value. *Journal of Democracy* 10.3, 3-17.
- Şen, I. G. (2015). *Sovereignty Referendums in International and Constitutional Law*. New York: Springer.
- Smith, P. W. (1991). *Speech Act Theory, Discourse Structure and Indirect Speech Acts*. Leeds: The University of Leeds.
- SNP. (1997). SNP Manifesto 1997: *Yes, we can win the best for Scotland*. Glasgow: Craig and Stewart Ltd.
- SNP. (2002). *The Scottish Constitution*. Edinburgh: SNP.
- SPICe Information. (2013a). *Scottish Independence Referendum Bill*. Edinburgh: SPICe Information.
- SPICe Information. (2013b). *SPICe Briefing Scottish Independence Referendum Bill*. Edinburgh: Scottish Parliament Information Centre.
- The Electoral Commission. (2014). *Scottish Independence Referendum Report on*. Ediburgh: The Electoral Commission.
- The Scottish Government. (2009b). *Your Scotland, Your Voice: A National Conversation*. Edinburgh: The Scottish Government.
- The Scottish Government. (2010). *Scotland's Future: Draft Referendum (Scotland) Bill Consultation Paper*. Edinburgh: The Scottish Government.
- The Scottish Government. (2013d). *Scottish Independence Referendum Act 2013*. Edinburgh: The Scottish Government.
- The Secretary of State for Scotland & Command of Her Majesty. (2012). *Scotland's constitutional future: Responses to the consultation*. London: The Stationery Office Limited.
- UKPOL. (2015, Desember 1). *Alex Salmond – 1987 Maiden Speech in the House of Commons*. Retrieved from UKPOL: Political Speech Archive – Over 5,500 speeches on British Politics: <http://www.ukpol.co.uk/uncategorized/alex-salmond-1987-maiden-speech-in-the-house-of-commons/>
- United Nations. (1945). *Charter of United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Francisco: United Nations.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International Relations Theory Edition No. 5*. New Jersey: Pearson Education.
- Weber, C. (2005). *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction: A critical introduction Second edition*. New York: Routledge.
- Williams, P. D. (2008). *Security Studies: An Introduction*. New York: Routledge.
- Wormald, J. (2005). *Scotland: A History*. Oxford: Oxford University Press.